



## Penggunaan Dana Kelurahan Belum Fokus

UMBULHARJO (MERAPI) - Masyarakat di tingkat kelurahan diminta fokus dalam mengelola dana dari pemerintah agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Mengingat anggaran dari pemerintah yang digulirkan ke masyarakat di tiap kelurahan cukup besar setiap tahunnya.

"Selama ini kami melihat kelurahan masih belum fokus seperti apa penggunaan anggarannya. Jangan sampai sekadar anggaran untuk kegiatan rutin tiap tahun yang tidak memberikan manfaat banyak ke masyarakat," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Minggu (15/7).

Menurutnya, selama ini pemkot sudah mengalokasikan anggaran yang dikelola masyarakat sekitar Rp 200 juta-Rp 300 juta tiap kelurahan.

Misalnya yang dikelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK) berkisar Rp 80 juta-120 juta dan tiap RW sekitar Rp 10 juta. Selain itu masih ada anggaran melalui kecamatan berkisar Rp 400 juta-Rp 700 juta dan dari dinas yang besarnya bervariasi.

"Itu artinya sebenarnya anggaran ke kelurahan besar sekali tiap tahun. Kami di pemkot ingin agar anggaran itu dikelola betul-betul fokus pada apa yang akan dikembangkan dan mengkonsentrasikan anggaran agar manfaatnya lebih bisa dirasakan masyarakat," paparnya.

Dia mencontohkan misalnya ada rencana

menjadikan kelurahan sebagai pusat ekonomi berbasis batik jumputan. Maka perlu pembangunan infrastruktur yang mendukungnya agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama terkait rencana tersebut sehingga terlihat hasilnya. Oleh sebab itu target perencanaan program itu harus dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah kelurahan.

"Maka penting kita tekankan pada pembangunan jangka menengah tingkat kelurahan yang harus jadi tahun ini. Itu untuk menyandingkan RPJM Kelurahan dan RPJMD lalu dibuat *action* bersama. Fokusnya mau apa, mau dikembangkan seperti apa harus jelas," tutur Heroe.

Di samping itu target pembangunan itu juga harus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya sehingga mengalami perkembangan.

Misalnya di tahun kedua fokus pada penataan lingkungan, atau infrastruktur dan tahun berikutnya dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Dari segi kemampuan pengelolaan anggaran di masyarakat dia menilai masyarakat seperti LPMK dan kelurahan memiliki hal itu. Hal itu terbukti selama ini pengelolaan anggaran itu sudah berjalan.

"Memang kalau ada yang kurang dalam pengelolaannya karena ada yang baru pengurus RT dan RW-nya maupun LPMK," imbuhnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005